eL-Muhbib
Jurnal Pemikiran & Penelitian Pendidikan Dasar

P-ISSN: 2614-1051 & E-ISSN: 2716-5019

Volume 8, Nomor 2, Desember 2024

PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER DI INDONESIA: LANDASAN FILOSOFIS DAN YURIDIS DALAM MEMBENTUK GENERASI YANG BERKARAKTER

Muh. Fitrah[1*], Marzuki[2], Umar[3] , Mei Indra Jayanti[4], Syafruddin[5]
Universitas Muhammadiyah Bima, Indoensia[1,2,3,5]
Universitas Negeri Yogyakarta, Indoensia[1,2,3]
Universitas Nggusuwaru, Indoensia[4]

Corresponding Author: Muh. Fitrah, fitrahmath@gmail.com

ARTICLE INFO
Article history:
Received
10 Oktober 2024
Revised
25 November 2024
Accepted
27 Desember 2024

ABSTRAK

Pendidikan karakter di Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas dan moralitas yang kuat. Salah satu dasar utama dalam penguatan pendidikan karakter adalah filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang menekankan pentingnya pendidikan yang berpusat pada siswa, berlandaskan pada kebebasan, serta menghargai kodrat alam dan zaman. Filosofi "*Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani*" menunjukkan peran penting guru sebagai teladan, fasilitator, dan motivator dalam membimbing siswa. Secara yuridis, pendidikan karakter di Indonesia mendapat landasan kuat melalui kebijakan seperti Kurikulum Merdeka, yang mengutamakan pengembangan karakter bersama dengan pencapaian kompetensi akademik. Melalui pendekatan yang holistik, yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam tri pusat pendidikan, pendidikan karakter diharapkan dapat membentuk individu yang bertanggung jawab, mandiri, dan beretika. Implementasi konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam konteks modern semakin relevan dengan tantangan abad ke-21, yang membutuhkan generasi yang tidak hanya pintar tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Sehingga konsepsi pengembangan pendidikan karakter harus terus diperkuat sebagai landasan dalam menciptakan generasi yang siap menghadapi tantangan global.

Kata Kunci: *Pendidikan Karakter, Ki Hajar Dewantara, Filosofi Pendidikan, Kurikulum Merdeka, Generasi Berkarakter*

How to Cite : Muh. Fitrah, et.,al,. (2024). Penguatan Pendidikan Karakter Di Indonesia: Landasan Filosofis Dan Yuridis Dalam Membentuk Generasi Yang Berkarakter. *El. Muhbib: Junal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Dasar.* Vol. 8, No. 2: 378-393.
DOI : https://doi.org/https://doi.org/10.52266/el-muhbib
Journal Homepage : https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/
This is an open access article under the CC BY SA license
: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

PENDAHULUAN

Ibarat membangun sebuah rumah, maka harus berpijak pada pondasi yang kuat agar bangunan tersebut mampu berdiri dengan kokoh. Begitu juga pendidikan karakter harus memiliki pijakan dalam melaksanakannya agar mendapatkan hasil yang baik. Ada beberapa landasan yang seharusnya menjadi pijakan dalam

mewujudkan pendidikan karakter tersebut. Dalam melaksanakan pendidikan karakter baik pemerintah selaku pembuat kebijakan, guru sebagai pelaksana serta semua komponen pendukung terlaksananya pendidikan karakter harus mengacu atau perpegangan pada beberapa landasan. Acuan ini dimaksud agar dalam melaksanakan pendidikan karakter tidak menyimpang dari jati diri bangsa Indonesia.

Pendidikan karakter merupakan aspek penting dalam pembentukan identitas dan moral individu (Kasingku & Sanger, 2023; Sakti et al., 2024), seperti Indonesia. Di tengah arus globalisasi yang semakin deras, pendidikan karakter berperan sebagai fondasi untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara (Sakti et al., 2024; Susilo et al., 2024). Di Indonesia, pendidikan karakter sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 serta mengatasi permasalahan kebangsaan saat ini, maka Pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Semangat itu telah ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, di mana pendidikan karakter ditempatkan sebagai landasan untuk mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.

Akar atau landasan pendidikan karakter telah ada sejak munculnya peradaban manusia. Landasan pendidikan karakter adalah prinsip, nilai, dan tujuan yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan karakter (Fatmala et al., 2024). Sumber landasan pendidikan karakter dapat berasal dari agama, budaya, filosofi, hukum, dan kebijakan pemerintah (Nadila & Alam, 2024).

Landasan pendidikan karakter di Indonesia dapat dilihat melalui berbagai kebijakan dan strategi yang diimplementasikan oleh pemerintah, mulai dari kurikulum pendidikan, pelatihan guru, hingga program-program nasional yang mendukung penanaman nilai-nilai luhur. Kurikulum pendidikan nasional Indonesia, misalnya, secara eksplisit mencantumkan tujuan untuk membangun karakter siswa melalui pengajaran nilai-nilai moral, agama, dan budaya. Selain itu, berbagai lembaga dan organisasi pendidikan juga berperan aktif dalam merumuskan dan melaksanakan program-program yang mendukung pendidikan karakter.

Pentingnya pendidikan karakter di Indonesia semakin terasa dalam lingkup tantangan sosial dan budaya yang dihadapi masyarakat. Perubahan sosial yang cepat, kemajuan teknologi, dan masalah-masalah sosial seperti korupsi dan penurunan moralitas memerlukan respons yang strategis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pendidikan karakter bukan hanya menjadi tanggung jawab institusi pendidikan, tetapi juga melibatkan peran serta keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Landasan Filosofis Pendidikan Karakter Bangsa

a. Pancasila sebagai Dasar Filosofis Pendidikan Karakter

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, menempatkan peran yang sangat signifikan di dalam membentuk karakter bangsa dan pembangunan moral

masyarakat. Karakter bangsa berasal dari prinsip Pancasila (Munasib, Taufiq, & Sumantri, 2023). Pancasila tidak hanya menjadi landasan filosofis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga menjadi dasar utama dalam proses pendidikan, khususnya pendidikan karakter. Secara filosofis, landasan pendidikan karakter dapat dijelaskan pada aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi (Aryana, 2021; Hasanah et al., 2022). Marzuki (2012) menyimpulkan bahwa pendidikan karakter bangsa harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Setiap sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai moral dan etika yang menjadi panduan dalam membentuk kepribadian individu serta menciptakan masyarakat yang harmonis dan beradab. Pendidikan karakter yang berlandaskan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan individu yang mampu berpikir kritis, berperilaku etis (Purna, Prakoso, & Dewi, 2023; Maisaroh, & Untari, 2024), dan berkontribusi positif bagi kemajuan bangsa, sekaligus menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia (Zaman, 2019; Nadiah, Dewi, & Furnamasari, 2021).

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menekankan pentingnya keyakinan dan penghormatan terhadap agama sebab ada nilai religius pada sila "ketuhanan yang tunggal", yang bisa diimplementasikan melalui kegiatan seperti doa bersama dan penyediaan fasilitas ibadah di sekolah. Sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, mengajarkan perlunya menghargai martabat setiap manusia, dengan menekankan pentingnya penghormatan terhadap sesama dan pencegahan bullying. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, fokus pada usaha mempertahankan persatuan bangsa, seperti menghindari sikap rasisme dan merayakan hari-hari besar nasional. Sila keempat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan, mengajarkan prinsip demokrasi dan musyawarah, seperti pemilihan ketua OSIS secara demokratis dan kebebasan berpendapat. Sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, menekankan pentingnya pemerataan fasilitas pendidikan dan keadilan dalam penilaian serta pemberian beasiswa. Dengan menerapkan nilai-nilai ini dalam pendidikan, diharapkan terbentuk karakter yang kokoh dan identitas nasional yang kuat.

Dari sisi epistemologis, pembelajaran karakter yang berlandaskan Pancasila memerlukan pemahaman mendalam tentang makna setiap sila dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan ini diperoleh melalui pendidikan formal di sekolah, diskusi tentang nilai-nilai Pancasila, dan penerapan praktis dalam berbagai konteks, baik di rumah, masyarakat, maupun interaksi sosial. Sebagai contoh, penerapan sila Ketuhanan Yang Maha Esa bisa dilakukan melalui kegiatan keagamaan di sekolah, sementara sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab diterapkan melalui penghargaan terhadap sesama dan upaya mengatasi bullying.

Secara aksiologis, pendidikan karakter berdasarkan Pancasila memberikan manfaat besar dengan membentuk individu yang selaras dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Ini termasuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan berintegritas, mencerminkan prinsip-prinsip persatuan dan keadilan sosial. Penerapan nilai-nilai

ini dalam pendidikan tidak hanya membentuk karakter individu, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan integritas bangsa.

b. Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara

Ki Hadjar Dewantara merupakan tokoh pendidikan yang memiliki kontribusi besar dalam membentuk sistem pendidikan di Indonesia. Filosofi pendidikan karakter yang dikembangkan oleh Ki Hadjar Dewantara tidak hanya berfokus pada pengembangan intelektual, tetapi juga pada pembentukan karakter dan moral yang kuat. Filosofi ini bertujuan menciptakan manusia Indonesia yang berkarakter, cerdas, dan beradab. Konsep utama dari filosofi pendidikan karakter Ki Hadjar Dewantara, termasuk Tri Pusat Pendidikan, *Sistem Among*, pendidikan holistik, serta penerapan prinsip *Ing Ngarsa Sung Tuladha*, *Ing Madya Mangun Karsa*, dan *Tut Wuri Handayani*.

1) Tri Pusat Pendidikan

Konsep pendidikan karakter di Indonesia, yang dipelopori oleh Ki Hadjar Dewantara, bahwa pendidikan karakter harus dirancang secara holistik dan berkelanjutan yaitu konsep Tri (tiga) Pusat Pendidikan, antara lain: sekolah, keluarga, dan masyarakat (Marzuki & Samsuri, 2022). Menurut Haryanto (2011) dan Asa (2019), keluarga merupakan pusat pendidikan pertama dan utama, tempat di mana nilai-nilai karakter mulai ditanamkan. Keluarga berfungsi sebagai fondasi dasar dalam pembentukan karakter anak, di mana nilai-nilai moral dan etika pertama kali diperkenalkan. Sekolah atau perguruan kemudian berperan dalam mengembangkan kecerdasan intelektual dan memberikan ilmu pengetahuan. Di sinilah pendidikan formal dimulai, memperluas wawasan dan pengetahuan yang ada dari individu atau anak itu sendiri. Masyarakat sebagai wadah dalam mengembangkan diri dan berinteraksi sosial. Murdiono et al (2021) menjelaskan bahwa peran individu sebagai bagian dari masyarakat yang saling mendukung, terutama dalam situasi krisis. Hal ini mencerminkan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari karakter yang baik. kesadaran sosial sebagai bagian dari pendidikan karakter, di mana individu diajak untuk memahami dan merespons kebutuhan orang lain dalam masyarakat.

2) Sistem Among

Sistem Among adalah metode pendidikan yang diperkenalkan oleh Ki Hadjar Dewantara dan menekankan pada pengembangan karakter dan kebebasan belajar siswa. Nugroho (2023) menjelaskan bahwa dalam Sistem Among, hukuman dan paksaan dilarang karena dapat menghambat jiwa merdeka dan kreativitas siswa. Metode ini mengedepankan kebebasan siswa untuk belajar sesuai dengan kodrat dan kemerdekaan mereka, yang dikenal dengan prinsip Asah, Asih, dan Asuh. Zulfiati (2018) menambahkan bahwa metode Among ini bertujuan memberikan kebebasan belajar dalam lingkungan yang penuh bimbingan dan kasih sayang guru, sehingga budi pekerti siswa dapat berkembang secara optimal. Prinsip ini mendorong siswa untuk belajar dengan motivasi intrinsik dan eksplorasi kreatif, alih-alih berdasarkan tekanan eksternal.

3) Pendidikan Holistik dan Karakter Bangsa

Ki Hadjar Dewantara menekankan pendidikan holistik yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Zulfiati (2018) menegaskan bahwa pendidikan karakter harus mencerminkan nilai-nilai ke-Indonesiaan, seperti kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Pendidikan karakter juga harus menghadapi tantangan globalisasi seperti relativisme nilai dan liberalisasi dengan tujuan membangun karakter yang kuat di tengah perubahan zaman (Samho, 2014). Pendidikan holistik ini memastikan bahwa siswa tidak hanya berkembang dalam aspek akademis tetapi juga dalam aspek emosional dan sosial, yang penting untuk menciptakan individu yang utuh dan seimbang.

4) Prinsip Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani

Prinsip Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tut Wuri Handayani merupakan wasiat luhur dari Ki Hadjar Dewantara yang relevan dalam pengembangan karakter siswa (Haryanto, 2011). Ing Ngarsa Sung Tuladha berarti "di depan memberi contoh," menekankan pentingnya guru sebagai teladan yang baik bagi siswa. Ing Madya Mangun Karsa berarti "di tengah membangun semangat," yang menggambarkan peran aktif guru dalam membangun motivasi dan semangat belajar siswa. Tut Wuri Handayani berarti "di belakang memberi dorongan," yang menunjukkan peran guru dalam memberikan dukungan moral dan dorongan kepada siswa untuk mencapai tujuan mereka (Suwahyu, 2018; Rahayuningsih, 2021; Bara & Tajibu, 2023). Penerapan prinsip-prinsip ini memastikan bahwa guru tidak hanya mengajar, tetapi juga berperan sebagai model, motivator, dan pendukung dalam proses pendidikan.

5) Konsep Humanisme dalam Pendidikan Karakter

Humanisme sebagai pendekatan filosofis menekankan nilai-nilai kemanusiaan dalam pendidikan karakter (Djayadin & Fathurrahman, 2020; Effendi, 2023). Pendidikan humanisme merupakan sistem pendidikan nasional, pendidikan ini cenderung lebih manusiawi dan mengutamakan komunikasi, dimana jika pendidikan ini terjalin akan menjadi salah satu jembatan dalam membentuk karakter siswa. Pendidikan humanis merupakan salah satu konsep yang sangat strategis untuk meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia) karena memiliki toleransi yang tinggi antar sesama manusia (Sabaruddin, 2020).

Ontologisnya, humanisme berfokus pada pengembangan potensi individu secara menyeluruh, dengan penekanan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, dan kemanusiaan. Pendidikan karakter yang berbasis humanisme bertujuan untuk membentuk individu yang tidak hanya kompeten secara akademis tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan etika yang tinggi.

Dalam aspek epistemologis, pendidikan karakter berbasis humanisme mengandalkan berbagai metode pembelajaran yang memfasilitasi pemahaman dan internalisasi nilai-nilai kemanusiaan. Metode ini termasuk dialog, refleksi diri, dan keterlibatan aktif dalam pengalaman sosial yang memperkuat pengertian tentang

hak asasi manusia dan keadilan sosial. Proses pembelajaran ini mendorong siswa untuk mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial mereka.

Secara aksiologis, nilai-nilai humanisme memberikan manfaat dengan menciptakan individu yang sensitif terhadap kebutuhan dan hak orang lain serta mampu berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Pendidikan karakter yang mengintegrasikan prinsip-prinsip humanisme berfungsi untuk membangun masyarakat yang adil dan berkeadilan, di mana setiap individu dihargai dan hak-haknya dipertimbangkan.

c. Religiusitas sebagai Landasan Moral

Aspek religiusitas dalam pendidikan karakter membentuk landasan moral yang kuat. Dalam pendidikan karakter, aspek religiusitas dalam Al-Qur'an membentuk landasan moral yang kokoh melalui berbagai ajaran yang menekankan akhlak dan etika. Surah Al-Furqan (25:63-77), menggambarkan karakteristik ideal dari orang-orang beriman, seperti kesabaran, kerendahan hati, dan pengendalian diri, yang menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam ayat 63, Allah menggambarkan hamba-Nya yang lemah lembut di dunia dan rendah hati. *(Hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan, "Salam.")*

Surah Al-Hujurat (49:11-13) mengajarkan tentang adab sosial dan pentingnya menghormati satu sama lain, serta menghindari prasangka buruk yang dapat merusak hubungan antarindividu. Dalam ayat 12, Allah berfirman, *"Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa."*

Sementara itu, Surah An-Nur (24:35) menggambarkan sifat-sifat Allah sebagai cahaya yang menerangi kehidupan, menekankan kejujuran dan kesucian dalam bertindak. Surah Al-Isra (17:70) menunjukkan pentingnya menghargai martabat manusia sebagai makhluk yang dimuliakan, sedangkan Surah Al-Ankabut (29:69) mendorong individu untuk berusaha mencari kebenaran dan kebaikan dengan tekun. Kesemua ajaran ini membentuk karakter yang baik dengan menanamkan nilai-nilai seperti ketaatan, empati, kasih sayang, kejujuran, dan integritas. Pendidikan karakter berbasis religiusitas ini tidak hanya memperkuat moralitas individu tetapi juga membangun hubungan yang harmonis dan saling menghormati dalam masyarakat.

Ontologisnya, religiusitas berhubungan dengan nilai-nilai ajaran agama yang membentuk etika dan moralitas individu. Pendidikan karakter yang berbasis religiusitas bertujuan untuk mengintegrasikan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari siswa, menjadikan nilai-nilai religius sebagai pedoman dalam perilaku dan interaksi sosial (Mujtaba et al., 2024). Dalam perspektif epistemologis, pengetahuan tentang karakter yang berbasis religiusitas diperoleh melalui pengajaran ajaran agama, praktik ibadah, dan refleksi atas nilai-nilai religius. Proses ini melibatkan pemahaman mendalam tentang ajaran agama dan penerapannya

dalam konteks kehidupan nyata. Pendidikan karakter yang religius memfasilitasi internalisasi nilai-nilai moral melalui pembelajaran dan pengalaman spiritual.

Secara aksiologis, pendidikan karakter yang berlandaskan religiusitas memberikan manfaat dengan membentuk individu yang memiliki integritas moral tinggi. Individu ini tidak hanya berperilaku sesuai dengan ajaran agama tetapi juga berinteraksi dengan sesama dengan penuh rasa hormat dan empati. Hal ini berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang harmonis dan beretika.

2. Landasan Yuridis Pendidikan Karakter Bangsa

Pendidikan karakter bukan aspek tambahan dalam sistem pendidikan, tetapi merupakan komponen pokok yang harus diintegrasikan dalam setiap aspek proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Landasan Yuridis untuk pendidikan karakter suatu bangsa seperti di Indonesia, antara lain:

a. Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 31, menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Lebih jauh, pasal ini menekankan bahwa pendidikan harus mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan akhlak mulia. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan karakter adalah bagian tak terpisahkan dari tujuan pendidikan nasional, yang bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan kecerdasan intelektual tetapi juga membentuk moralitas dan budi pekerti.

b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menekankan bahwa pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Pasal 3 dari undang-undang ini secara eksplisit menyebutkan pentingnya pendidikan karakter dalam membentuk watak siswa. Dengan demikian, pendidikan karakter dianggap sebagai elemen penting dalam pembentukan kepribadian dan moral siswa, yang mendukung pembentukan peradaban yang baik.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 menetapkan bahwa pendidikan harus berorientasi pada pengembangan karakter dan nilai-nilai moral yang baik. Dokumen ini mengatur bahwa kurikulum pendidikan harus mencakup aspek pengembangan karakter untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademis tetapi juga berakhlak mulia.

d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 memberikan panduan konkret untuk penguatan pendidikan karakter di sekolah. Peraturan ini mengatur bagaimana pendidikan karakter harus diintegrasikan dalam kurikulum serta dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pendekatan holistik yang

dianjurkan dalam peraturan ini melibatkan semua pihak terkait, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat, dalam upaya penguatan pendidikan karakter. Menurut Ma'ruf (2020), peraturan ini bertujuan untuk mengembangkan nilai moral dan etika melalui keterlibatan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Lubis dan Karnati (2022) mencatat bahwa PPK dilaksanakan melalui: 1) Analisis nilai karakter dalam kompetensi dasar, 2) Integrasi nilai karakter dalam perencanaan pembelajaran, 3) Pelaksanaan pembelajaran yang mencerminkan nilai karakter, dan 4) Penilaian dan evaluasi proses pembelajaran. Indarwati (2020) menekankan pendekatan holistik dalam PPK yang sejalan dengan prinsip-prinsip Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2017 menetapkan kerangka kerja yang lebih terstruktur untuk penguatan pendidikan karakter di semua satuan pendidikan formal. Ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa pendidikan karakter menjadi bagian integral dari sistem pendidikan nasional dan dilaksanakan secara konsisten di seluruh jenjang pendidikan. Beberapa penelitian-penelitian yang membahas tentang Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), antara lain Suanto & Nurdiyana (2020), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di SMK Letris Indonesia. Menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan pendekatan kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa SMK Letris Indonesia telah berhasil mengimplementasikan dan mengintegrasikan kebijakan PPK sesuai peraturan.

Namun, penelitian ini juga menyoroti perlunya evaluasi berkala untuk menilai efektivitas dan dampak kebijakan tersebut terhadap proses belajar mengajar. Musyarri (2020), penelitian ini fokus pada implementasi dan efektivitas Pendidikan Karakter berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 dengan menekankan pemikiran Ki Hadar Dewantara. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendidikan karakter dalam membangun sifat dan karakter manusia serta peran pemerintah dalam mengembangkan sistem Pendidikan Karakter di seluruh Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem ini bertujuan memperkuat nilai-nilai karakter, pembahasan lebih mendalam tentang efektivitasnya masih diperlukan. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter telah diimplementasikan dengan baik, diperlukan evaluasi berkala dan pembahasan lebih mendalam untuk memastikan efektivitas dan dampaknya dalam pendidikan karakter.

f. Ketetapan MPR dan Keputusan Presiden

Ketetapan MPR dan berbagai keputusan presiden juga memainkan peran penting dalam mendukung penguatan pendidikan karakter. Program prioritas

seperti Nawa Cita menegaskan pentingnya revolusi karakter sebagai bagian dari pembangunan nasional, bahwa pendidikan karakter merupakan elemen kunci dalam mencapai tujuan pembangunan bangsa.

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan kebijakan pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk mengimplementasikan Nawacita Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan PPK ini terintegrasi dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yaitu perubahan cara berpikir, bersikap, dan bertindak menjadi lebih baik. Nilai-nilai utama PPK adalah religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Nilai-nilai ini ingin ditanamkan dan dipraktikkan melalui sistem pendidikan nasional agar diketahui, dipahami, dan diterapkan di seluruh sendi kehidupan di sekolah dan di masyarakat. PPK lahir karena kesadaran akan tantangan ke depan yang semakin kompleks dan tidak pasti, namun sekaligus melihat ada banyak harapan bagi masa depan bangsa.

g. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter

Permenag Nomor 2 Tahun 2020 mengatur secara rinci mengenai tujuan, ruang lingkup, dan implementasi penguatan pendidikan karakter. Peraturan ini menekankan integrasi nilai-nilai agama dan Pancasila dalam pendidikan, serta melibatkan keluarga dan masyarakat dalam proses pendidikan karakter.Pendidikan karakter adalah kunci untuk membentuk generasi muda yang berkualitas dan berintegritas. Di Indonesia, setiap daerah memiliki peraturan yang mengatur pelaksanaan pendidikan karakter. Landasan Yuridis Pendidikan Karakter di beberapa daerah Indonesia mengungkapkan bahwa kebijakan terkait pendidikan karakter didasarkan pada berbagai regulasi pemerintah yang diterapkan di tingkat nasional maupun daerah.

Pada database https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=karakter ditemukan setidaknya 4.349 Dokumen yang membahas pendidikan karekter. Beragam peraturan perundang-undangan ini bertujuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian dalam sistem pendidikan formal, mulai dari sekolah dasar hingga tingkat menengah. Di berbagai daerah, kebijakan ini diterjemahkan ke dalam bentuk program-program spesifik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks lokal. Setiap daerah memiliki pendekatan tersendiri dalam mengimplementasikan pendidikan karakter, tetapi tetap berpegang pada kerangka regulasi nasional. Selain itu, terdapat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan bahwa pendidikan karakter diintegrasikan secara sistematis ke dalam kurikulum. Peraturan yang ada juga memastikan bahwa pendidikan karakter tidak hanya fokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pengembangan pribadi siswa, yang mencakup moralitas, tanggung jawab sosial, dan kejujuran. Melalui pendekatan yuridis ini, pendidikan karakter diharapkan mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas

secara intelektual tetapi juga berkarakter kuat, sehingga mampu berkontribusi positif bagi masyarakat.

Tabel 1. di bawah ini memperlihatkan berbagai peraturan daerah atau bupati yang ditetapkan untuk membentuk karakter masyarakat dan melaksanakan pendidikan karakter. Setiap peraturan memiliki pendekatan yang berbeda, tetapi semuanya bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter yang esensial bagi pembentukan generasi muda yang unggul.

Tabel 1. Landasan yuridis pendidikan karakter di beberapa daerah Indonesia

Peraturan	Konten	Pokok Bahasan
PERBUP Sumbawa No. 33/2021	Pendidikan Karakter	Mewujudkan pelajar Pancasila, mengembangkan kemampuan dan karakter peserta didik, memberikan arah dan kepastian hukum.
PERBUP Purwakarta No. 131/2022	Pendidikan Karakter	Pengembangan karakter dan kompetensi melalui kearifan lokal, program anti-korupsi, sekolah ramah anak.
PERDA Kudus No. 5/2021	Penguatan Pendidikan Karakter	Mewujudkan SDM berkarakter baik sesuai fungsi pendidikan nasional, penguatan pendidikan karakter formal, nonformal, informal.
PERDA Salatiga No. 11/2023	Penguatan Pendidikan Karakter	Mengembangkan watak dan peradaban bangsa, pembinaan pendidikan karakter sesuai budaya lokal.
PERBUP Brebes No. 35/2024	Pedoman Pendidikan Karakter	Mewujudkan pelajar berkarakter, mengatur pelaksanaan pendidikan karakter di satuan pendidikan.
PERBUP Jepara No. 51/2021	Pendidikan Karakter dan Budi Pekerti	Mewujudkan nilai-nilai budaya dan akhlak mulia melalui pendidikan karakter.
PERDA Pontianak No. 3/2021	Pendidikan Karakter	Penguatan nilai-nilai religius, toleran, disiplin, kreatif, cinta tanah air dalam pendidikan karakter.
PERBUP Pangandaran No. 58/2017	Pendidikan Karakter	Penguatan nilai religius melalui pendidikan karakter di Kab. Pangandaran.
PERDA Karanganyar No. 9/2016	Peningkatan Nasionalisme	Meningkatkan semangat nasionalisme dan karakter bangsa untuk menjaga keutuhan negara.
Qanun Aceh Besar No. 8/2019	Pendidikan Karakter Anak	Meningkatkan keimanan dan akhlak mulia, menjamin pemerataan pendidikan dan pembentukan karakter anak.
PERBUP Nganjuk No.	Pendidikan	Menanamkan pendidikan karakter

Peraturan	Konten	Pokok Bahasan
17/2020	Karakter dan Anti Korupsi	dan budaya anti korupsi sejak dini di satuan pendidikan.
PERDA Lamongan No. 7/2020	Penguatan Pendidikan Karakter	Membentuk peserta didik berkarakter sesuai iman, taqwa, dan budaya bangsa Indonesia.
PERWALI Banjarbaru No. 73/2017	Penguatan Pendidikan Karakter	Penguatan pendidikan karakter dengan nilai religius, kerja keras, cinta damai, tanggung jawab.
PERBUP Kulon Progo No. 70/2021	Pendidikan Karakter Berbasis Budaya	Penguatan pendidikan karakter melalui pelestarian budaya daerah Yogyakarta.
PERWALI Yogyakarta No. 42/2021	Penguatan Pendidikan Karakter	Penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan dengan nilai religius, jujur, cinta tanah air.
PERDA Lampung Tengah No. 2/2021	Penguatan Pendidikan Karakter	Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter pada satuan pendidikan.
PERBUP Wakatobi No. 47/2022	Penanaman Nilai Karakter	Penguatan nilai religius, jujur, toleran, disiplin dalam pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal.

Pendidikan karakter di Indonesia memiliki landasan yuridis yang kuat, berakar pada berbagai peraturan nasional dan daerah. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional serta peraturan-peraturan daerah memberikan kerangka hukum yang menyeluruh untuk pengembangan pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Setiap daerah di Indonesia mengimplementasikan kebijakan ini dengan pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal, menunjukkan fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Kearifan lokal memegang peranan penting dalam membentuk strategi pengajaran, memastikan bahwa nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan relevan dengan konteks masyarakat setempat.

Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan utama dalam pendidikan karakter, yang tidak hanya bertujuan untuk menciptakan individu yang berprestasi secara akademis, tetapi juga memiliki moralitas, spiritualitas, dan kemampuan sosial yang baik. Integrasi nilai-nilai Pancasila ini menarik karena menjadikan ideologi negara sebagai pondasi dalam pembentukan karakter generasi muda. Selain itu, terdapat sinergi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan pendidikan karakter diimplementasikan secara efektif. Pemerintah pusat memberikan panduan umum, sementara daerah diberi kebebasan untuk menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kondisi dan tantangan lokal.

Pendidikan karakter ini diterapkan dengan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga aspek sosial dan emosional siswa. Pendekatan ini menekankan pengembangan siswa secara utuh, sehingga mereka siap menghadapi tantangan masa depan dengan integritas dan kecerdasan

emosional yang baik. Meskipun demikian, penerapan kebijakan ini dihadapkan pada berbagai tantangan di tingkat daerah, mulai dari keterbatasan sumber daya hingga perbedaan kondisi sosial-ekonomi. Namun, melalui inovasi dan adaptasi, banyak daerah berhasil mengatasi hambatan tersebut, menunjukkan bahwa pendidikan karakter yang efektif dapat dicapai dengan dukungan kebijakan yang fleksibel dan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, pendidikan karakter di Indonesia tidak hanya mencerminkan keselarasan antara pusat dan daerah, tetapi juga menjadi cerminan pentingnya pengembangan karakter dalam membentuk generasi yang bermoral, berdaya saing, dan berkepribadian kuat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

3. Kompilasi Gagasan Pendidikan Ki Hajar Dewantara: Relevansi dan Penerapannya

Gagasan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang menekankan pembentukan karakter siswa melalui filosofi pendidikan yang holistik, tetap relevan dalam konteks pendidikan Indonesia saat ini. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan harus berpusat pada siswa, menghargai kebebasan, serta menyelaraskan pendidikan dengan kodrat alam dan zaman. Filosofi *"Ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani"* mengajarkan pentingnya peran guru sebagai teladan, fasilitator, dan motivator yang membimbing siswa untuk berkembang. Gagasan ini tercermin dalam Kurikulum Merdeka yang mengutamakan pembelajaran berbasis karakter, yang tidak hanya berfokus pada aspek akademik tetapi juga pada pengembangan moral dan nilai-nilai kehidupan (Yulianto, 2024; Insani, Haryono, & Fahrudin, 2024). Selain itu, konsep "Tri Pusat Pendidikan," yang melibatkan keluarga, sekolah, dan masyarakat, menggarisbawahi pentingnya sinergi ketiga elemen ini untuk mendukung perkembangan karakter dan potensi siswa (Putri & Andriany, 2024; Perdani, Busri, & Tabrani, 2024).

Selain itu, penerapan gagasan Ki Hajar Dewantara dalam konteks pendidikan modern terus menunjukkan relevansinya, khususnya dalam menghadapi tantangan pendidikan abad ke-21. Dalam sistem "*Among*," yang menekankan hubungan kekeluargaan antara guru dan siswa, pendidikan dipandang sebagai sarana untuk membebaskan potensi diri siswa, dengan menghargai kebebasan dan kreativitas. Dewantara juga mengusung konsep "Merdeka Belajar," yang memberikan ruang bagi siswa untuk belajar sesuai dengan minat dan kemampuannya, selaras dengan tujuan Kurikulum Merdeka yang fleksibel dan partisipatif. Dalam hal ini, gagasan Dewantara tetap mengedepankan nilai-nilai budaya Indonesia serta menanamkan prinsip tanggung jawab sosial yang berlandaskan moralitas dan etika (Lila, 2024; Hutagalung & Andriany, 2024; Habsy et al., 2024). Integrasi nilai-nilai ini dalam pendidikan memberi fondasi yang kuat bagi pembentukan karakter generasi muda, mempersiapkan mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia (Destiana et al., 2024; Fahmi, 2024; Sari, Fadilah, & Baroroh, 2024).

SIMPULAN

Pendidikan karakter bangsa di Indonesia memiliki landasan filosofis, yuridis, dan moral yang kokoh. Filosofisnya, pendidikan karakter mengacu pada nilai-nilai Pancasila sebagai panduan utama, filosofi Ki Hadjar Dewantara yang menekankan pendekatan holistik, serta humanisme yang mengutamakan potensi dan martabat individu. Secara yuridis, kerangka pendidikan karakter didukung oleh berbagai regulasi, seperti UUD 1945, UU Sistem Pendidikan Nasional, dan kebijakan seperti PPK, yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam sistem pendidikan formal maupun nonformal. Aspek religiusitas juga menjadi fondasi moral dalam pembentukan individu yang berintegritas dan etis. Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, pendidikan karakter di Indonesia bertujuan untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga berperilaku mulia, bertanggung jawab sosial, dan siap menghadapi tantangan global.

DAFTAR PUSTAKA

Aryana, I. M. P. (2021). Urgensi Pendidikan Karakter (Kajian Filsafat Pendidikan). Kalangwan Jurnal Pendidikan Agama, Bahasa Dan Sastra, 11(1), 1–10. http://ejournal.ihdn.ac.id/index.php/Kalangwan/article/view/2372/1808

Asa, A. I. (2019). Pendidikan karakter menurut ki hadjar dewantara dan driyarkara. *Jurnal pendidikan karakter*, *10*(2). http://dx.doi.org/10.21831/jpk.v9i2.25361

Bara, L. H. B., & Tajibu, K. (2023). Pendidikan Karakter Dalam Filsafat Pendidikan Islam. *ISTIQRA: Jurnal Hasil Penelitian*, *11*(1), 1-17. https://doi.org/10.24090/insania.v23i2.2290

Haryanto. (2011). Pendidikan karakter menurut Ki Hadjar Dewantara. *Cakrawala Pendidikan*, Edisi Khusus Dies Natalis UNY. https://ditpenjamu.uny.ac.id/sites/ditpenjamu.uny.ac.id/files/02%20Haryanto%20KTP.pdf

Djayadin, C., & Fathurrahman, F. (2020). Teori Humanisme sebagai Dasar Etika Religius (Perspektif Ibnu Athā'illah Al-Sakandarī). *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 28-39.

Effendi, Y. R. (2023). Sebuah kajian filosofis: Pendidikan karakter berbasis nilai dan norma Pancasila. *Journal of Humanities and Civic Education*, *1*(1), 29-45. http://dx.doi.org/10.33830/jhce.v1i1.5726.

Fatmala, S., Sari, N. E. P., Lestari, T., Safira, G., Hidayatullah, P., & Nurmalasari, V. (2024). Pancasila dan Multikulturalisme: Implementasi pada Nilai-Nilai Dasar Pancasila dan Makna yang Terkandung sebagai Pendidikan Karakter. *Jurnal Basicedu*, *8*(1), 19-35. https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i1.6725

Hasanah, A., Arifin, B. S., Mahyani, A., & Saepurahman, A. (2022). Landasan Teori Pendidikan Karakter. Jurnal Sains Sosio Humaniora, 6(1), 725–736. https://doi.org/10.54371/jiip.v5i7.675

Indarwati, E. (2020). Implementasi penguatan pendidikan karakter melalui budaya sekolah. *Teacher in Educational Research*, *2*(1), 1-11. http://dx.doi.org/10.33292/ter.v2i1.60

Kasingku, J., & Sanger, A. H. F. (2023). Pengaruh pendidikan karakter terhadap moralitas remaja di era digital. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *8*(2), 6096-6110. https://doi.org/10.23969/jp.v8i2.10220

Lubis, E. Z., & Karnati, N. (2022). Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Kelas: Studi Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, *11*(1), 95-103. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10607

Maisaroh, A. A., & Untari, S. (2024). Transformasi Pendidikan Karakter Melalui Kebijakan Pemerintah Di Indonesia Menuju Generasi Emas 2045. *Jurnal kebijakan pemerintahan*, 18-30. https://doi.org/10.33701/jkp.v0iNomor%201.4347

Marzuki, M. (2012). Pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran di sekolah. *Jurnal Pendidikan Karakter*, (1), 122370. http://dx.doi.org/10.21831/jpk.v0i1.1450

Marzuki, M., & Samsuri, S. (2022). The strategy of three education centers for strengthening character education in Indonesia in the era of Industrial Revolution 4.0. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, *19*(1), 119-133. http://dx.doi.org/10.21831/jc.v19i1.40325

Murdiono, M., et al. (2021). Strengthening the Social Caring Character of the Citizens during the Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) Pandemic. *HONG KONG JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES*, 58, 775-781. http://hkjoss.com/index.php/journal/article/view/528/524

Munasib, M., Taufiq, M., & Sumantri, R. A. (2023). The Urgency of Civic Education in the Nation Character Building. *COMPETITIVE: Journal of Education*, *2*(3), 169-177. https://doi.org/10.58355/competitive.v2i3.46

Ma'ruf, M. F. (2020). Implementasi Permendikbud Nomor 20 tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. *Jurnal Pendidikan Dewantara: Media Komunikasi, Kreasi Dan Inovasi Ilmiah Pendidikan*, *6*(2), 93-102. https://jurnal.stkippgritrenggalek.ac.id/index.php/dewantara/article/view/56

Mujtaba, I. M., Farihen, F., Setianingsih, D., Sularno, S., Mahardika, A. Z., Maharani, P. G., & Adriani, F. (2024). Pelatihan Penyusunan Bahan Ajar Tematik Terintegrasi Pendidikan Karakter Religius Berbasis Al Qur'an. *AN-NAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(1), 23-32. https://doi.org/10.24853/an-nas.4.1.23-32

Musyarri, F. A. (2020). Anotasi atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *1*(7), 40-46. https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i7.230

Nadiah, L., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Pendidikan Karakter Bangsa yang Berlandaskan Pancasila. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *5*(3), 7875-7883. https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.2261

Nadila, A. P., & Alam, A. M. F. (2024). Menelaah Keberhasilan Pendidikan Karakter Di Jepang Untuk Menunjang Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Di Indonesia. *JISPENDIORA Jurnal Ilmu Sosial Pendidikan Dan Humaniora*, *3*(2), 242-258. https://doi.org/10.56910/jispendiora.v3i2.1555

Nugroho, B. (2023). Filosofi Pendidikan Ki Hadjar Dewantara Basis Dalam Merdeka Belajar Untuk Mencetak Manusia Indonesia Berkarakter. *Psiko Edukasi*, *21*(1), 28-40. https://doi.org/10.25170/psikoedukasi.v21i1.4374

Purna, T. H., Prakoso, C. V., & Dewi, R. S. (2023). Pentingnya karakter untuk pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pendidikan di era digital. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, *2*(1), 192-202. https://journal.unimar-amni.ac.id/index.php/Populer/article/download/614/520

Rahayuningsih, F. (2021). Internalisasi filosofi pendidikan ki hajar dewantara dalam mewujudkan profil pelajar pancasila. *SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, *1*(3), 177-187. https://doi.org/10.51878/social.v1i3.925

Sabaruddin, S. (2020). Sekolah dengan konsep pendidikan humanis. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, *20*(2), 154-156. http://dx.doi.org/10.21831/hum.v20i2.29306

Sakti, S. A., Endraswara, S., & Rohman, A. (2024). Revitalizing local wisdom within character education through ethnopedagogy apporach: A case study on a preschool in Yogyakarta. *Heliyon*, *10*(10). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e31370

Sakti, S. A., Endraswara, S., & Rohman, A. (2024). Integrating local cultural values into early childhood education to promote character building. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, *23*(7), 84-101. https://doi.org/10.26803/ijlter.23.7.5

Samho, B. (2014). Pendidikan Karakter Dalam Kultur Globalisasi: Inspirasi Dari Ki Hadjar Dewantara. *Melintas*, *30*(3), 285-302. http://dx.doi.org/10.26593/mel.v30i3.1447.285-302

Suanto, S., & Nurdiyana, N. (2020). Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, *7*(2), 107-114. https://doi.org/10.32493/jpkn.v7i2.y2020.p107-114

Susilo, S., Pramono, S. E., & Sutarto, J. (2024). Integrating Faith and Ethics in Police Education: A Phenomenological Study on Character Cultivation at the Indonesian Police Academy. *The Journal of Educational Development*, *12*(2), 53-62. https://doi.org/10.15294/jed.v12i2.2308

Suwahyu, I. (2018). Pendidikan karakter dalam konsep pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, *23*(2), 192-204. https://doi.org/10.24090/insania.v23i2.2290

Zaman, B. (2019). Urgensi pendidikan karakter yang sesuai dengan falsafah bangsa indonesia. *Al Ghazali*, *2*(1), 16-31. https://www.ejournal.stainupwr.ac.id/index.php/al_ghzali/article/view/101

Zulfiati, H. M. (2018, April). Sistem among Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan karakter di sekolah dasar. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP Universitas Muhamamdiyah Cirebon* (pp. 311-322). https://e-journal.umc.ac.id/index.php/pro/article/view/92

Yulianto, H. (2024). Disiplin Positif Pada Kurikulum Merdeka: Tinjauan Filosofi Pendidikan Menurut Ki Hajar Dewantara. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan*

Nusantara, *1*(1), 626-637. https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/view/89

Insani, S. N., Haryono, A., & Fahrudin, R. N. (2024). Peran Filosofi Pendidikan Ki Hadjar Dewantara Dalam Membangun Pendidikan Karakter Siswa. *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, *4*(7), 2-2. https://doi.org/10.17977/um063v4i7p2

Lila, M. M. N. (2024). Internalisasi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara Untuk Mewujudkan Profil Pelajar Pancasila. *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, dan Pengelolaan Pendidikan*, *4*(6), 14-14. https://doi.org/10.17977/um065v4i62024p14

Hutagalung, T. B., & Andriany, L. (2024). Filosofi Pendidikan Yang diusung Oleh Ki Hadjar Dewantara dan Evolusi Pendidikan di Indonesia. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, *2*(3), 91-99. https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i3.615

Putri, I. A., & Andriany, L. (2024). Studi Literatur Pemikiran Ki Hajar Dewantara Terkait Filosofi Pendidikan dalam Kurikulum Merdeka di Indonesia. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, *2*(2), 156-163. https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i2.472

Perdani, A. S., Busri, H., & Tabrani, A. (2024). Perjalanan Pendidikan di Indonesia dalam Perspektif Filosofis Ki Hajar Dewantara. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, *18*(2), 1197-1205. http://dx.doi.org/10.35931/aq.v18i2.3124

Habsy, B. A., Rohida, A. I., Sudarsono, M., Sholikhah, M. A., Firdaus, M., & Anzhani, V. A. (2024). Tantangan Pendidikan Abad Ke-21: Pemikiran Ki Hajar Dewantara dan Implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *8*(1), 5065-5077. https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13163

Destiana, A., Nopriani, H., Siliani, O., Novita, W., & Annur, S. (2024). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka Yang Relevan Terhadap Konsep Pendidikan Ki Hajar Dewantara. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, *10*(2), 326-338. https://doi.org/10.36989/didaktik.v10i2.3072

Sari, A., Fadilah, M. N., & Baroroh, U. (2024). Analisis Implikasi Konsep Sistem Among Dan Trikon Ki Hajar Dewantara Di Sd Negeri Jatibarang 01. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *9*(2), 262-276. https://doi.org/10.23969/jp.v9i2.15904

Fahmi, R. (2024). Pemikiran Ki Hajar Dewantara Dan Relevansinya Dalam Pendidikan Karakter Di Era Modern. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, *7*(4), 15445-15452. https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i4.36715